

BAB IX

PENUTUP

9.1. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya belum optimal pada Perekrutan GPK, yang dikhawatirkan justru akan menimbulkan berbagai dampak, antara lain: tidak terjadi adanya *peer teaching* dan *peer tutor*, yang berakibat kurang optimalnya proses pembelajaran ABK di kelas inklusif, sehingga dapat juga terjadi adanya pembiaran yang berakibat trauma antara lain karena adanya *bullying*.
2. Faktor pendukung pada implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya adalah Komitmen Pemerintah Kota untuk secara bertahap memenuhi kebutuhan perekrutan GPK. Sementara faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya anggaran yang berdampak pada tidak dapat dipenuhinya kebutuhan GPK yang dibutuhkan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sesuai regulasi yang ada.
3. Model penyelenggaraan pendidikan inklusif yang relevan khususnya terkait perekrutan GPK di Kota Surabaya adalah Perekrutan GPK bukan dari guru kelas atau guru mata pelajaran/bidang studi, tetapi rekrutmen calon GPK berasal dari lulusan S1 Program Kependidikan yang diberi pelatihan keahlian khusus sebagai GPK.

9.2. Rekomendasi

1. Kota Surabaya agar melakukan evaluasi mendalam untuk sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, jika belum dapat terpenuhi standar perekrutan GPK yang dibutuhkan, agar dievaluasi kembali karena berdampak negatif terhadap pendidikan ABK.
2. Faktor pendukung dapat di *follow up* dengan pemenuhan GPK yang dibutuhkan sesuai regulasi. Faktor penghambat terkait anggaran yang terbatas sebaiknya menggunakan asas prioritas, tidak mengejar jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tetapi kualitas yang diutamakan.

3. Kota Surabaya agar memberi prioritas pemenuhan GPK sesuai model yang relevan dari hasil penelitian ini dan juga segera mengeluarkan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya sebagai pedoman Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang di dalamnya juga terkait dengan perekrutan GPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Abdullah, 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Bandi Delphie, 2006, *Pembelajaran Anak Tunagrahita; Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusif*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Baihaqi dan M. Sugiartini, 2006, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bogdan R.C. dan Biklen SK., 1982, *Qualitative Educational Research Qualitative, An Introduction To Teory and Method*, Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Bungin, Burhan. 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis keArah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W., Vicki L. Plano Clark. 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications
- Daniel P. Hallahan dkk., 2009, *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc.
- David Smith, 2006, *Inklusif, Sekolah Ramah untuk Semua*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Policy Brief, Sekolah Inklusif; Membangun Pendidikan Tanpa Diskriminasi*, No. 9. Th.II/2008,
- Dunn, N. William, Muhadjir Darwin (Penyunting), 2001. *Analisis Kebijakan Publik: Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah*, Yogyakarta: Hanindita.
- _____, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.

- Elva Nurul Prastiwi (2019), <https://www.gesuri.id/kerakyatan/pemkot-surabaya-kembangkan-sekolah-inklusif-b1WelZiNC>, diakses tanggal 3 September 2019.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press. Departemen Pendidikan Nasional.
- Gavin Reid, 2005, *Dyslexia and Inclusion; Classroom Approaches for Asesmen, Teaching and Learning*, London: David Fulton Publisher.
- Iwa Kuntadi. 2007. *Profesionalisme Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan dalam Era Teknologi Informasi*.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kustawan, Dedy, 2012, *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*, Jakarta Timur: Luxima Metro Media.
- Kominfo Jatim, 2011. *Jatim Miliki 15 Daerah Yang Punya Sekolah Inklusif*, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/27293>, diakses tanggal 9 Januari 2020
- Milles & Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif (tentang metode-metode baru)*, Jakarta: UI-Press.
- Meter, Donald Van, & Carl Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, dalam Adinistration and Society*, London: Sage.
- Moleong, Lexy. J. 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya
- Nawawi, Ismail, 20012, *Metoda Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Ilmu Sosial, Ekonomi/Ekonomi Islam, Agama, manajemen, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- PLB, Direktorat (2004). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif: Mengenal Pendidikan Terpadu*. Jakarta: Depdiknas. hlm. 9.
- Putro Agus Harnowo,
<http://health.detik.com/read/2013/07/17/184234/2306161/1301/jumlah-anak-berkebutuhan-khusus-di-indonesia-diperkirakan-42-juta>, di kutip tanggal 10 Mei 2019

- Ripley, R.B., & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Sunardi. 1995. *Kecenderungan Dalam pendidikan Luar iasa*. Dikti. Depdikbud. Jakarta.
- Sukardi, (2006) *Penelitian Kualitatif Naturalistik dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Usaha Keluarga.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit AIPI Bandung, Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen pendidikan nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2008. *Arah Baru Pendidikan*, Harian Kompas, edisi 9 Juni 2008
- Yusuf, Indra. 2008. *Menakar Kualitas Pendidikan Kita*. Harian Kompas, edisi 21 Juli 2008.
- . 2008. *Proposed Outcomes in TVET Asia Pacific Conference*. Adelaide. UNESCO. 1997. *Training of Teacher/Trainers in Technical and Vocational Education* Section for Technical and Vocational Education.
- <http://haniahfebriyanto.wordpress.com/2012/01/17/pendidikan-inklusif-sebagai-alternatif-model-pendidikan/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur.